

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DOKUMEN RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan petunjuk-Nya, Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas ESDM Tahun 2025 ini disusun dalam rangka mendukung program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan serta mempunyai kedudukan strategis dalam rangka menjembatani antara perencanaan pembangunan Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya mineral ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dinas, penyusunan perencanaan APBD Provinsi, serta pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan Renja ini diharapkan juga dapat memberikan acuan dan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Palembang, Desember 2024

Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,



HENDRIANSYAH, ST, M.Si
NIP. 197212151999031005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	4
2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	12
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	18
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024	4
Tabel TC-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	5
Tabel TC-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan	13
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	17

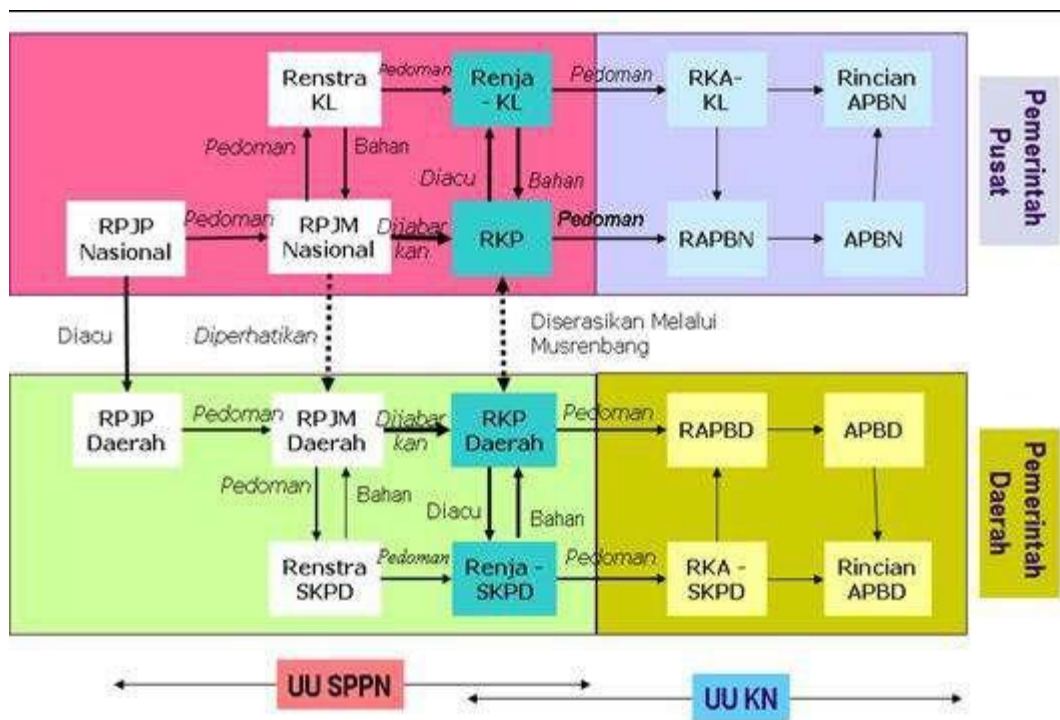
DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis data eksisting. Usulan program/kegiatan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing program/kegiatan. Hubungan antara dokumen Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya pada level pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah peraturan

tentang pemerintahan, perencanaan dan pembangunan dan peraturan yang terkait dengan penganggaran dan keuangan. Peraturan-peraturan yang dimaksud antaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengawal implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD pada tahun berjalan;
2. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra SKPD periode waktu 2024– 2026;
3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang termaktub di dalam Renstra periode waktu 2019 – 2023;

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan Energi dan Sumber daya mineral;
2. Sebagai bahan kajian yang akan diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target

Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian kinerja untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran, program/kegiatan di dalam dokumen Renstra SKPD serta mendukung RPJMD tersaji dalam realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	
			Realisasi s.d. 31 Desember 2024	Target s.d Akhir Tahun
(1)	(2)	(3)	(4 = 3/2*100%)	(6)
TOTAL BELANJA	24.804.236.983	23.465.000.409	94,60	100,00
Belanja Operasi	23.954.236.983	22.615.000.409	94,41	100,00
Belanja Pegawai	16.918.189.066	15.962.991.366	94,35	100,00
Belanja Barang & Jasa	7.036.047.917	6.652.009.043	94,54	100,00
Belanja Modal	850.000.000	850.000.000	100	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000.000	850.000.000	100	100,00

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Keterangan/Kendala/Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						(Rp)	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DESDM</i>	<i>24.804.236.983</i>				23.465.000.409	94,60	100,00	100,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	22.685.378.183				21.392.375.369	94,30	100,00	100,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.913.766				188.749.366	89,92	100,00	100,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.673.766	Palembang	42	100	87.673.766	100,00	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122.240.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	58	100	101.075.600	82,69	100,00	100,00	-
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.016.819.066				16.931.379.366	93,98	100,00	100,00	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.700.029.066	Palembang	92,69	100	15.760.334.699	94,37	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.098.630.000	Palembang	6,10	100	968.388.000	88,15	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	218.160.000	Palembang	1,21	100	202.656.667	92,89	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
9	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	Palembang	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	-
10	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0				0	0,00	0,00	0,00	
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Pergeseran Anggaran di APBD
12	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	581.385.132				559.840.882	96,29	100,00	100,00	
13	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	581.385.132	Palembang	100	100	559.840.882	96,29	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000				38.143.000	63,57	100,00	100,00	
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	Palembang	100	100	38.143.000	63,57	100,00	100,00	Calon peserta Diklat berhalangan mengikuti pelatihan

16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.008.882.219				968.645.000	96,01	100,00	100,00	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	Palembang	0,99	100	9.815.000	98,15	100,00	100,00	-
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	325.000.000	Palembang	32,21	100	323.321.000	99,48	100,00	100,00	-
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	Palembang	9,91	100	69.501.150	69,50	100,00	100,00	-
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	Palembang	1,49	100	11.808.000	78,72	100,00	100,00	-
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.882.219	Palembang	55,40	100	554.199.850	99,16	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000.000				1.000.000.000	100,00	100,00	100,00	
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.000.000	Palembang	85	100	850.000.000	100,00	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
24	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	Cabang Dinas Reg II dan 5 (Musi Banyuasin dan Lahat)	15	100	150.000.000	100,00	100,00	100,00	-
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	943.400.000				882.164.330	93,51	100,00	100,00	
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Palembang	1,06	100	5.000.000	50,00	100,00	100,00	-
27	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	577.400.000	Palembang	61,20	100	539.164.730	93,38	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.000.000	Palembang	37,74	100	337.999.600	94,94	100,00	100,00	-

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Keterangan/Kendala /Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						(Rp)	%	%		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.978.000				823.453.425	95,20	100,00	100,00	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000	Palembang	75,15	100	613.152.425	94,33	100,00	100,00	-
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	Palembang	5,78	100	49.800.000	99,60	100,00	100,00	-
32	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.978.000	Palembang	19,07	100	160.501.000	97,29	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
33	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN KE GEOLOGIAN	200.000.000				198.232.200	99,12	100,00	100,00	
34	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100.000.000				98.918.200	98,92	100,00	100,00	
35	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	100.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100	100	98.918.200	98,92	100,00	100,00	-
36	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100.000.000				99.314.000	99,31	100,00	100,00	
37	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	100.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100	100	99.314.000	99,31	100,00	100,00	-

38	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	450.000.000				418.895.440	93,09	100,00	100,00	
39	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50.000.000				49.770.000	99,54	100,00	100,00	
40	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100	100	49.770.000	99,54	100,00	100,00	-
41	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	110.000.000				105.611.007	95,98	100,00	100,00	
42	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	50.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	45,45	100	47.808.500	95,62	100,00	100,00	-

43	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	60.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	54,55	100	57.802.507	96,34	100,00	100,00	-
44	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000				49.876.000	99,75	100,00	100,00	
45	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100	100	49.876.000	99,75	100,00	100,00	-

53	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	50.000.000				49.775.000	99,55	100,00	100,00		
54	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	50.000.000			0	0	49.775.000	99,55	100,00	100,00	-
55	Pengendalian dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	50.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100	100	49.775.000	99,55	100,00	100,00		
56	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.418.858.800			0	0	1.405.722.400	99,07	100,00	100,00	-
57	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40.000.000					39.998.300	100,00	100,00	100,00	
58	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100	100	39.998.300	100,00	100,00	100,00		
59	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	80.000.000				0	69.279.400	86,60	100,00	100,00	-
60	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	50	100	29.576.600	73,94	100,00	100,00		Dari jumlah target perusahaan yang mengajukan IUJPTL, sebagian besar perusahaan yang mengajukan IUJPTL berada di kota Palembang
61	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	50	100	39.702.800	99,26	100,00	100,00		-

62	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	1.298.858.800				1.296.444.700	99,81	100,00	100,00	
63	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	40.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	3,08	100	38.524.000	96,31	100,00	100,00	-
63	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.218.858.800	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	94	100	1.218.858.800	100,00	100,00	100,00	Pergeseran Anggaran di APBD
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	40.000.000	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	3,08	100	39.061.900	97,65	100,00	100,00	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kewenangan Provinsi pada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang sangat signifikan pada beberapa sub urusan pemerintahan. Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk perangkat daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 79 tahun 2016 dan Keputusan Gubernur no. 14 tahun 2016. Secara Kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok gubernur Sumatera Selatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan melalui perencanaan strategi pembangunan 5 (lima) tahunan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Adapun pada pasal 4, tugas Kepala Dinas adalah membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi.

b. Fungsi

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut diatas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi :				
	a. Batu Gamping	Ton	3.127.577,73	3.192.344,85	102,07
	b. Clay Stone	Ton	392.017,64	392.017,64	100
	c. Batubara	Ton	118.462.084,05	110.697.518,75	93,45
2	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	180	195	108,33
3	Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia	MW	3.909	4.179	106,91
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100	99,99	99,99
5	Persentase Desa Berlistrik	%	100	99,26	99,26
6	Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi	Jumlah Perusahaan	75	53	70,67
7	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar	%	33,3	48,97	147,06
8	Persentase Peningkatan Bauran EBT	%	21,06	24,18	114,81
9	Jumlah PNPB Sektor ESDM	Milyar	964,7	1.250,22	129,60
10	Jumlah Retribusi Sektor ESDM				
	- Pendapatan Retribusi	Juta	2.500.000	5.482.900	219,32
	- Pendapatan BLUD	Juta	200.000.000	202.895.735	101,45

Setiap tahunnya pencapaian kinerja selalu mengalami peningkatan. Salah satu yang menjadi fokus utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Rasio Desa Berlistrik, pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Selatan memiliki total desa yang dialiri listrik oleh PLN sebanyak 3.238 desa dari 3.258 total desa di Kabupaten/Kota. Persentase Desa dengan Akses Listrik di Sumatera Selatan terealisasi menjadi 99,26% dari target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja pada tahun 2024.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibatasi Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan serta energi baru terbarukan, sisanya dilakukan oleh Pusat seperti mineral logam, batubara, migas, panas bumi dan pembangkit listrik yang terintegrasi dengan PLN.

Berikut adalah jumlah produksi Batu Gamping, Batu Clay Stone, dan Batubara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024:

1. Jumlah produksi Batu Gamping pada tahun 2024 terealisasi 3.192.344,85 ton dari target 3.127.577,73 ton dengan tingkat capaian sebesar 102,07%.
2. Jumlah produksi Clay Stone pada tahun 2024 terealisasi 392.017,64 ton dari target 392.017,64 dengan tingkat capaian sebesar 100%.
3. Jumlah produksi Batubara pada tahun 2024 terealisasi 110.697.518,75 dari target 118.462.084,05 dengan tingkat capaian sebesar 93,45%.

Untuk menjaga pasokan batu bara di dalam negeri pemerintah telah pengatur kewajiban DMO bagi pemegang PKPIUB dan IUPK batu bara sebagai berikut. Pertama kebijakan tersebut tertuang dalam UU nomor 3/2020 yang mengamanatkan kebijakan nasional pengutaman mineral atau batubara untuk kepentingan di dalam negeri. Dalam PP No 23/2010 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengutamakan kebutuhan batu bara dalam negeri sedangkan ekspor bisa dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Adapun capaian Produksi batubara untuk Pasal 4 ayat 1 mengamanatkan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara, dan pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan secara objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik secara langsung (internal) maupun secara tidak langsung (eksternal) terhadap kinerja instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] tahun anggaran 2025 tidak terlepas dari kondisi yang ada saat ini dimana Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jaringan gas rumah tangga dan listrik subsidi tepat sasaran yang di mulai dari masyarakat pedesaan, kelurahan, kecamatan serta kabupaten/kota secara berjenjang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, diantaranya:

1. Monev Distribusi Penyaluran BBM dan Elpiji;
2. Inventarisasi Rumah tangga tidak mampu berlistrik;
3. Monev subsidi listrik tepat sasaran.

Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 671/1452/DESDM/VI-1/2023 perihal Dukungan Usulan Bantuan Pasang Baru Listrik 7 (tujuh) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Data Usulan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang baru diterima Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan adalah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 2.602 kk, Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 1.051 KK, Kabupaten Kota Pagar Alam sebanyak 1.565 KK, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 1.495 KK, Kabupaten Muara Enim 40 KK, Kota Prabumulih 255 KK dan Kabupaten Banyuasin 521 KK. Jumlah total permohonan BPBL di 7 (tujuh) Kab/Kota sebanyak 7.529 kk dengan dana sebesar Rp. 15.058.000.000,-
2. Terkait hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung adanya Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui dana APBN, yang meliputi penyediaan instalasi listrik, pemeriksaan instalasi listrik dan penyambungan sebagai pelanggan PLN.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, tema dan agenda pembangunan yang diusung adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan". Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, tema yang ditetapkan adalah "Mempercepat transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan", didukung prioritas Nasional yaitu :

1. Ketahanan ekonomi;
2. Pengembangan Wilayah;
3. Sumber Daya manusia;
4. Revolusi mental dan kebudayaan;
5. Infrastruktur;
6. Stabilitas Polhukhankam dan Pelayanan Publik.

Prioritas nasional yang terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral adalah prioritas nasional nomor 5 "infrastruktur " yang memiliki kebijakan antara lain :

1. Pengembangan energi terbarukan, pengembangan pada panas bumi (geothermal), energi biomassa, surya (solar) dan bahan bakar nabati;
2. Pemanfaatan biofuel;
3. Pembangunan listrik pedesaan;
4. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja dirumuskan berdasarkan isu-isu penting yang sudah dijabarkan pada BAB sebelumnya. Tujuan dan sasaran rencana kerja untuk tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran dalam Rencana Strategis	Tujuan dalam Rencana Kerja	Sasaran dalam Rencana Kerja
1.	Meningkatnya usaha mineral non logam dan batuan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan mineral non logam dan batuan	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha pertambangan mineral non logam dan batuan untuk memenuhi kaidah-kaidah good mining practice
2.	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan akses listrik	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan listrik	Ketersediaan akses listrik bagi masyarakat
3.	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	Meningkatkan kontribusi energi baru dan energi terbarukan terhadap kebutuhan energi dan listrik	Ketersediaan akses energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Terwujudnya tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan	Terwujudnya pelayanan publik sektor ESDM yang profesional

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

SKPD : 3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								Rp28.505.875.250,00	Rp752.793.725,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.258.668.975,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp28.505.875.250,00	Rp752.793.725,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.258.668.975,00	
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			Rp28.505.875.250,00	Rp752.793.725,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.258.668.975,00	
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp24.234.996.250,00	Rp752.793.725,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.987.789.975,00	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
							Semua Kelurahan/Desa						
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp18.295.209.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.295.209.000,00	
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp16.802.249.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.802.249.000,00	
3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.270.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000.000,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp222.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.960.000,00	
3	29	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Rp845.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.000.000,00	
3	29	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp845.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								Tahun					
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Semua Kelurahan/Desa						
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp1.750.000.000,00	Rp570.464.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.320.464.975,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp570.464.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp570.464.975,00	
3	29	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp980.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp980.000.000,00	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
3	29	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.785.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.785.600.000,00	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota,	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Sumatera Selatan, Ilir Barat I, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00		
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.120.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.120.600.000,00		
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.091.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.091.516.000,00		
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Provinsi Sumatera Selatan, Ilir Barat I, Semua	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Sumatera Selatan, Ilir Barat I, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp191.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.516.000,00		
3	29	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Sumatera Selatan, Ilir Barat I, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00		
3	29	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp17.671.250,00	Rp182.328.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00		
3	29	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Provinsi Sumatera Selatan, Ilir Barat I,	Rp17.671.250,00	Rp182.328.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
							Semua Kelurahan/Desa						
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			Rp2.025.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.025.000.000,00	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil								
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Rp132.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.000.000,00	
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp132.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.000.000,00	
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
3	29	03	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Rp288.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp288.000.000,00	
3	29	03	1.07	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	
3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp58.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.000.000,00	
3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	29	03	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	03	1.12	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	29	03	1.13	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000.000,00	
3	29	03	1.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	
3	29	03	1.14	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.000.000,00	
3	29	03	1.14	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	
3	29	03	1.24		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan			Rp870.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp870.000.000,00	
3	29	03	1.24	0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp270.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
							Semua Kelurahan/Desa							
3	29	03	1.24	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00		
3	29	03	1.25		Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		
3	29	03	1.25	0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			Rp485.879.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp485.879.000,00		
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		
3	29	05	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		Semua Kelurahan/Desa							
3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi			Rp95.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00		
3	29	05	1.05	0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp95.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00		
3	29	05	1.06		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		
3	29	05	1.06	0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			Rp145.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.000.000,00		
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang,		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					investasi) di daerah		Semua Kelurahan/Desa							
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp95.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00		
3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00		
3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00		
3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi			Rp70.879.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.879.000,00		
3	29	05	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota		Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp70.879.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.879.000,00		
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			Rp1.560.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.560.000.000,00		
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			Rp465.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp465.500.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp465.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp465.500.000,00
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			Rp237.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.500.000,00
3	29	06	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp87.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00
3	29	06	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Rp857.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp857.000.000,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp128.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.500.000,00	
3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp128.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.500.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2025 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2024 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis [Renstra SKPD] tahun kelima, mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] 2019 – 2023.
- c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Palembang, Desember 2024

Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,



HENDRIANSYAH, S.T., M.Si
Pmbina Utama Muda
NIP. 197212151999031005